

**PENATAAN LAHAN TRANSMIGRASI SEBAGAI TANAH OBJEK
REFORMA AGRARIA: FENOMENA DESA BUKIT PADI DAN DESA
ULUMARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD DHAHLAN

NIT. 21303797

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study discusses the problems of transmigration land as an object of Agrarian Reform in Bukit Padi Village and Ulumaras Village, Jemaja Timur District, Anambas Islands Regency. Agrarian Reform aims to create social justice through land redistribution, but implementation in transmigration areas often faces mismatches between land subjects and objects as well as agrarian conflicts. This study uses a concurrent mixed methods approach by integrating quantitative and qualitative data to obtain a holistic understanding. Chronological analysis shows that control and ownership of transmigration land are no longer in accordance with their original designation, thus hampering regional development. The results of the land availability study indicate that of the total HPL transmigration, 1,941.15 hectares (57,29%) have the potential to become TORA objects, with the majority being agricultural and plantation land covering 1,495.45 hectares (53.73%). The study's recommendations emphasize the need for restructuring the structure of land control and utilization through Agrarian Reform mechanisms, with priority on Other Use Areas (APL) and mechanisms for changing the function of forest areas in accordance with regulations. These findings are expected to support spatial planning policies and optimize the use of transmigration land in border areas, while also strengthening the welfare of transmigrant communities.

Keywords: *Agrarian Reform, Transmigration, TORA, Anambas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
INTISARI	XIV
<i>ABSTRACT</i>	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	19
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Pertanyaan Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Format Penelitian	40
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	41

C. Definisi Operasional.....	43
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Desa Bukit Padi	59
B. Gambaran Umum Desa Ulumaras.....	66
BAB V DUDUKAN LAHAN TRANSMIGRASI	72
A. Bidang Lahan Transmigrasi	72
B. Problematika Lahan Transmigrasi.....	74
C. Sebaran Sertipikat HPL Transmigrasi	81
BAB VI KETERSEDIAAN LAHAN TRANSMIGRASI	87
A. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	87
B. Ketersediaan Lahan di Luar Kawasan Hutan.....	107
C. Ketersediaan Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	110
BAB VII REKOMENDASI PENATAAN SPASIAL.....	115
A. Peranan Analisis Spasial Dalam Konteks Penyediaan TORA	115
B. Peranan Dalam Konteks Pengembangan Wilayah	119
BAB VIII PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan fondasi utama bagi sistem agraria, yang menentukan tingkat produktivitas, keberlanjutan jangka panjang, serta kesejahteraan petani dan komunitas pedesaan. Secara umum, sumber daya alam dibedakan menjadi dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, dan interaksi manusia dengan sumber daya alam dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas manusia serta upaya pelestarian sumber daya alam secara luas (Artajaya, 2022). Berlandaskan kerangka teoretis maupun empirik, tanah dipandang sebagai sumber daya utama yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya keagamaan bagi komunitas agraris. Nilainya melampaui sekadar aspek finansial karena tanah berfungsi sebagai pemicu mobilisasi modal, penyedia tenaga kerja, serta pembentuk identitas komunitas; akibatnya, perubahan pola penguasaan tanah secara langsung memengaruhi struktur sosial pedesaan (Syahyuti, 2016). Secara konsisten, pandangan ini menegaskan bahwa tanah adalah sumber daya sentral bagi kehidupan masyarakat agraris, dengan peran ganda sebagai aset ekonomi sekaligus faktor sosial-budaya (Sulistiyono dkk., 2024). Berbagai kebijakan publik menunjukkan bahwa perubahan pola penguasaan tanah, termasuk reformasi agraria, berpotensi memengaruhi pola produksi, akses terhadap sumber daya, serta dinamika kekuasaan di tingkat desa. Penelitian tentang politik agraria menekankan bahwa perubahan kepemilikan tanah dapat mengubah struktur pedesaan dan kekuatan aktor lokal maupun non-lokal (Syahyuti, 2016). Hal ini relevan untuk menjelaskan bagaimana tanah sebagai sumber daya agraria bisa menjadi inti konflik maupun solusi pembangunan pedesaan, tergantung pada konteks kebijakan dan implementasinya.

Reforma Agraria secara global sudah digagas sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu dimana semboyan *land to the tiller* sudah berkumandang sejak tahun 565 sebelum masehi (Wiradi, 2005). Semboyan itu sendiri mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada petani yang sudah

mengelola ataupun sudah menggarap tanah tersebut. Reforma Agraria itu sendiri sampai dengan pertengahan abad ke-19 masih dikenal dengan sebutan nama *Landreform*. *Landreform* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA Nomor 5 tahun 1960. *Landreform* merupakan bagian inti dari segala upaya pembaruan agraria di Indonesia dengan tujuan menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah khususnya untuk para petani kecil. Reforma Agraria digadang-gandang mencakup berbagai langkah untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi kepemilikan dan penggunaan lahan (Prasetyoadi & Fatima, 2024). Pandangan para pengamat hukum agraria melihat konsepsi reforma agraria selalu mengalami pasang surut perubahan sejalan dengan perkembangan atau dinamika kapitalistik dan sosialistik dimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan pengaturan masyarakat pada negara-negara agraris (Kuswahyono, 2024).

Reforma Agraria adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melakukan redistribusi lahan untuk memperluas hak atas tanah bagi warga, dengan fokus menyeimbangkan kepemilikan, akses, dan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan komunitas pedesaan. Pelaksanaan reformasi ini sering menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan, regulasi, dan hak atas tanah, meskipun sejumlah kajian menunjukkan bahwa reforma agraria berupaya meredistribusi hak milik dan memperkuat kepastian hukum bagi penerima manfaat (Doly, 2017; Hamdhani & Hadiyantina, 2025; Salim dkk., 2021; Ramdani, 2020). Reforma Agraria dalam UUPA melarang penguasaan tanah yang melampaui batas demi kepentingan umum dimana dijelaskan pada pasal 7 UUPA. Tujuannya adalah agar mengurangi tingkat ketimpangan pemilikan lahan dan sebagai bentuk menciptakan keadilan sosial. Bila dilihat dari segi kesejarahannya, dapat ditinjau dari berbagai buku dengan beragam disiplin pendekatan dan dapat diambil kesimpulan bahwa sejak beberapa abad silam telah terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan manusia atas tanah. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antar masyarakat dan permasalahan ini berkelanjutan sampai saat ini. Reformasi lahan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong redistribusi lahan

dan mengamankan hak-hak kelompok sosial terpinggirkan, akan tetapi tidak selalu berhasil untuk mencapai tujuan tersebut (Pacheco, 2009).

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disebut TORA dijelaskan dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara ataupun tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang akan didistribusikan atau dilegalisasi. Penerima TORA disebut juga dengan Subjek Reforma Agraria dimana harus memenuhi persyaratan sebagai penerima TORA. Objek reforma agraria diterangkan dalam Perpres tersebut diantaranya adalah tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, tanah wajib 20% dari luasan bidang HGU, tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan, tanah negara bekas tanah telantar, tanah penyelesaian sengketa dan konflik agraria, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir, tanah bekas eigendom, tanah kelebihan maksimum, tanah absente dan tanah swapraja atau bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan sebagai objek Redistribusi tanah. Upaya pemerintah dalam menindak lanjuti TORA dengan memastikan bahwa reforma agraria dapat dilaksanakan sesuai tujuan sasaran yang ditetapkan (Prasetyoadi & Fatima, 2024). Sekian banyak objek reforma agraria yang dijabarkan dalam Perpres, penelitian ini memfokuskan pada objek reforma agraria yang berasal dari tanah Transmigrasi.

Lahan Transmigrasi merupakan salah satu dari kriteria TORA dimana lahan Transmigrasi banyak sekali mengalami problematika di seluruh Indonesia, padahal salah satu program unggulan Indonesia pada puluhan tahun ke belakang ialah program Transmigrasi (Sukarno dkk., 2023). Kontroversi kepemilikan tanah di daerah transmigrasi maupun kawasan HGU yang berpotensi direlokasi memerlukan mekanisme penyelesaian yang terpadu, mencakup legalisasi aset dan pembuktian kepemilikan bagi penerima manfaat. Berbagai kajian menekankan bahwa proses legalisasi serta redistribusi tanah perlu dipadukan dengan perlindungan hak atas tanah dan mekanisme partisipasi publik untuk mengurangi konflik yang muncul (Ramadhan & Octarina, 2022; Nurjihadi, 2019). Problematika yang berlangsung lama terhadap tanah transmigrasi menyebabkan ketimpangan penguasaan dan

pemilikan tanah di wilayah transmigrasi. Tanah Transmigrasi yang menyisakan ribuan hektar dengan status tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia. Lahan Transmigrasi tersebut diketahui memiliki Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 28 Tahun 1996. Surat Keputusan HPL Transmigrasi sampai saat ini belum diketahui nomor SK HPLnya namun informasi terkait SK HPL diketahui diterbitkan pada tahun 1996 (SK ... /HPL/BPN/96). Lahan tersebut menjadi lahan tidur karena tidak adanya pemanfaatan dan pembangunan lebih lanjut dengan urun waktu yang sangat lama. Akibatnya lahan sisa dari tanah Transmigrasi yang biasa disebut dengan lahan restan sekarang menjadi rebutan masyarakat tanpa kepastian hukum, dan lahan Permukiman awal penduduk transmigrasi saat ini sudah banyak tidak sesuai antara subjek dan objek pemilikan tanahnya. Objek reforma agraria yang berasal dari tanah transmigrasi merupakan kategori TORA yang berasal dari tanah hasil penyelesaian sengketa termasuk ketidaksesuaian antara subjek dan objek tanah dan konflik agraria. Dalam Perpres nomor 62 tahun 2023 menegaskan bahwa salah satu objek legalisasi asset program reforma agraria adalah tanah transmigrasi yang belum bersertipikat dimana masih banyak persoalan masa lalu yang belum selesai (Medaline & Moertiono, 2023).

Objek reforma agraria yang berasal dari tanah transmigrasi adalah tanah yang telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi, tanah yang belum bersertipikat dan tidak termasuk dalam Kawasan hutan sesuai dengan yang dijelaskan Perpres 62 tahun 2023. Objek tanah transmigrasi dimaksudkan menjadi objek legalisasi asset yang ditetapkan sebagai TORA dan diberikan kepada subjek reforma agraria melalui mekanisme sertifikasi tanah transmigrasi ataupun redistribusi tanah. Redistribusi tanah dari hasil penyelesaian konflik agraria pada lokasi tanah transmigrasi pelaksanaannya tetap memprioritaskan hak transmigran sebagai subjek reforma agraria. Perlu adanya identifikasi, inventarisasi dan sinkronisasi data subjek dan objek yang bersumber dari penegasan areal transmigrasi atau di atas tanah transmigrasi untuk dasar TORA.

Objek transmigrasi yang menjadi lokus dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berlokasi di Pulau Jemaja, khususnya di Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras, obyek transmigrasi ini terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam. Wilayah perbatasan selama ini hanya mengedepankan segi keamanan dan kedaulatan wilayah sehingga pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan (Daim, 2020). Lokasi Pulau Jemaja pada dasarnya merupakan dataran rendah dan sangat cocok untuk permukiman dan bercocok tanam. Program transmigrasi merupakan program pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemindahan penduduk untuk memulai usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi lokasi transmigrasi (Rachman & Noviarini, 2018). Dalam hal ini lokasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras memiliki potensi tersebut dan tersebar disetiap wilayah transmigrasi. Potensi Pulau Jemaja dari segi aspek lahannya dapat mencetak sawah sebagai bagian sarana pendukung pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan (Soewandita, 2018).

Penelitian ini dibuat sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaian lahan Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian problematika di lokasi transmigrasi, baik itu terkait dudukan lahan di lokasi transmigrasi maupun terkait ketersediaan lahan untuk TORA di luar Kawasan hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dudukan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana ketersediaan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras di luar Kawasan Hutan?

3. Bagaimana rekomendasi kebijakan penataan spasial untuk permasalahan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Mengetahui dudukan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas
 - b. Menganalisis ketersediaan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas
 - c. Memberikan rekomendasi kebijakan penataan spasial guna mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Memberikan manfaat akademis, yaitu diantaranya kontribusi secara ilmiah dalam upaya penataan spasial melalui analisis ketersediaan lahan di luar Kawasan Hutan dalam optimalisasi pemanfaatan lahan.
 - b. Manfaat praktis kepada berbagai pihak, seperti:
 - i. Untuk Pejabat pemangku kepentingan, dalam hal ini didapatkan rekomendasi analisis penataan spasial yang dapat dilakukan dalam pertimbangan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan lahan Transmigrasi.
 - ii. Sebagai bahan analisis guna memberi rekomendasi dalam penyelesaian masalah lahan Transmigrasi secara khusus.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengkaji perihal problematika lahan transmigrasi yang ada di Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi focus penelitian ini, yakni: Kronologis, Ketersediaan dan Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika lahan transmigrasi berawal dari kondisi penguasaan dan pemilikan tanah yang sudah tidak sesuai dengan semestinya dan adanya hambatan dalam pembangunan daerah karena mayoritas wilayah desa berada di atas lahan Transmigrasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis *fish bone* untuk mengulik lebih detail bagaimana kronologis terjadinya permasalahan yang ada pada lokasi transmigrasi. Analisis ini mengidentifikasi akar masalah secara sistematis dengan unsur 5M (*Man, Methode, Material, Mechine and Money*) menunjukkan hasil dimana keseluruhan proses pelaksanaan program transmigrasi masih banyak kekurangan dari setiap unsurnya. Sehingga penguasaan dan pemilikan lahan transmigrasi saat ini sudah tidak sesuai dan perlu adanya penataan ulang kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui mekanisme Reforma Agraria.
2. Ketersediaan lahan yang berpotensi sebagai objek TORA di lokasi lahan transmigrasi seluas 3.388 hektar diantaranya merupakan fungsi Kawasan APL seluas 1.941,15 hektar dengan persentase 57,29%, sedangkan yang tidak berpotensi diantaranya fungsi Kawasan HL,HP dan HPK seluas 842,14 hektar dengan persentase 24,86%. Ketersediaan lahan yang ada di HPL transmigrasi mayoritas merupakan lahan pertanian dan perkebunan seluas 1.495,45 hektar atau sebesar 53,73% dari keseluruhan lahan yang *clean and clear* yang dapat didistribusikan dan dapat membantu ketahanan pangan masyarakat.

Sedangkan ketersediaan lahan untuk program PTSL seluas 391,39 hektar dengan persentase 14,06% dan ketersediaan lahan untuk program pertanahan lainnya seluas 54,20 hektar dengan persentase 1,95%. Lahan yang tidak tersedia lainnya merupakan lahan yang sudah bersertipikat dari pembagian program transmigrasi seluas 450,25 hektar atau sebesar 13,29%, sertipikat bukan dari pembagian program transmigrasi seluas 138,58 hektar atau sebesar 4,09% dan sisanya merupakan lahan yang saat ini kondisi eksistingnya adalah laut seluas 15,88 hektar atau sebesar 0,47%.

3. Rekomendasi dari hasil analisis potensi lahan transmigrasi, peneliti merekomendasikan bahwa lokasi yang berada di fungsi Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dapat segera dijadikan menjadi objek TORA dalam program Reforma Agraria. Sedangkan lahan transmigrasi yang masuk dalam Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK) bisa dijadikan objek TORA dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Kawasan Hutan Lindung (HL) dalam lokasi HPL transmigrasi dapat mengalami perubahan fungsi, tetapi tidak langsung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Perubahan HL hanya dapat diubah ke fungsi lain dalam Kawasan hutan yaitu menjadi Hutan Konservasi atau Hutan Produksi dengan syarat Kawasan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai hutan lindung atau Kawasan tersebut memenuhi kriteria sebagai Hutan Produksi/ Hutan Konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 37 dan pasal 39 pada PP No. 104 Tahun 2015. Begitu pula sama halnya dengan Kawasan Hutan Produksi (HP) dalam Kawasan HPL transmigrasi juga dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan namun perlu mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan Produksi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai pasal 43 pada PP No. 104 tahun 2015. Setelah perubahan fungsi Kawasan menjadi hutan Produksi yang dapat dikonversi, maka pelepasan Kawasan hutan dapat

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait problematika tanah transmigrasi di Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur ini, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan kepada para pihak, antara lain:

1. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian ATR/BPN perlu terus mendorong penyelesaian problematika tanah transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia agar masalah yang terjadi pada kawasan transmigrasi tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan permasalahan baru sehingga akan menumpuk. Perlu adanya koordinasi dan pembentukan tim terpadu antara instansi terkait untuk percepatan penyelesaian tanah transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia.

2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di unit daerah, baik dari Dinas Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait hasil dari ketersediaan dan rekomendasi objek TORA pada lahan transmigrasi. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dengan mekanisme Reforma Agraria guna mencapai tujuan dari Reforma Agraria itu sendiri sehingga pembangunan daerah akan terus berjalan untuk menciptakan pengembangan wilayah yang adil, tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. A., Nurwati, R. N., & Mulyana, N. (2019). Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1128>
- Adji, M. W. H., Yulianti, S., Tresnaningrum, S., & Norrista, E. G. (2021). Transmigration as a Strategy for Strengthening National Food Security. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(1), 86–107. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i1.110>
- Ahmad, A., Purwito, L., Jumain, J., & Sari, R. P. (2022). Inovasi Pembelajaran Dalam Jaringan Dengan Konsep PANDAWA: Kajian Deskriptif Di Sekolah Dasar Islam Bani Hasyim. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 290–298. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.2878>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Amini, A., Syahrial, & Alirmansyah. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Media Question Box Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Muatan PPKN Kelas Iii Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 5(2), 316–323. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v5i2.1550>
- Arifah, A., & Mutmainnah, M. (2018). The Ignorance of Indigeneous Property Rights Through the Resettlement Program in Indonesia. *Jurnal Galung Tropika*, 7(2), 88. <https://doi.org/10.31850/jgt.v7i2.354>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*, 21(2), 83. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, I. M., Salman, D., Pulubuhu, D. A. T., Unde, A. A., J, A. R., & Amiruddin, A. (2021). Keterkaitan Peran Antar Lembaga Dalam Pembangunan Pertanian Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Agroland Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(1), 1–16. <https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v27i3.619>
- Artajaya, N. K. F. P. P. I. W. E. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Air Di Sungai Bindu. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2961>
- Asnawi, A., & Huwae, J. (2021). Pengaruh Gaya Hidup Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Kawasaki Ninja Di Kota Ambon. *Jmas*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.392>

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Jemaja Timur Dalam Angka Tahun 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. <https://anambaskab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/4893fad155b89e698d8a49d0/kecamatan-jemaja-timur-dalam-angka-2025.html>
- Barter, S. J., & Côté, I. (2015). Strife of the Soil? Unsettling Transmigrant Conflicts in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(1), 60–85. <https://doi.org/10.1017/s0022463414000617>
- Baskoro, A. (2025). Keadilan Dalam Tata Kelola Pangan: Kajian Keadilan John Rawls Terhadap Problematika Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 103–120. <https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14763>
- Boyle, E., Fary, R., Kang, K., Evans, K., Rebbeck, T., & Beales, D. (2020). A Systematic Scoping Review of Patient Health Outcomes and Perceptions Following Management of Low Back Pain via Care Pathways in Primary Health Care. *Musculoskeletal Care*, 19(1), 84–109. <https://doi.org/10.1002/msc.1510>
- Cruz, A. C., Ângelo, M., & Santos, B. P. d. (2017). Self-Efficacy Scale for the Establishment of Good Relationships With Families in Neonatal and Pediatric Hospital Settings. *Revista Da Escola De Enfermagem Da Usp*, 51(0). <https://doi.org/10.1590/s1980-220x2016033803222>
- Cruz, G. T. (2010). Weapons of the Weak. *Missiology an International Review*, 38(4), 383–394. <https://doi.org/10.1177/009182961003800403>
- Daim, C. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus: Kabupaten Natuna). *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.199>
- Datakepri.com. (2025). *Petani Desa Bukit Padi Panen Padi 3,5 Ton, Dinas Pertanian Anambas Dorong Pemanfaatan Lahan Lebih Maksimal*. Datakepri.Com. <https://datakepri.com/2025/03/petani-desa-bukit-padi-panen-padi-35-ton-dinas-pertanian-anambas-dorong-pemanfaatan-lahan-lebih-maksimal/>
- Deng, J., Wang, K., Hong, Y., & Qi, J. (2009). Spatio-Temporal Dynamics and Evolution of Land Use Change and Landscape Pattern in Response to Rapid Urbanization. *Landscape and Urban Planning*, 92(3–4), 187–198. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.05.001>
- Dharyanti, D., Azmi, Y. F. K., Dewari, A. P., Putri, S. A. F., Karyanti, T., Utomo, A. P. Y., & Pramono, D. (2024). Analisis Prinsip Kesantunan Dalam Teks Anekdote Pada Buku Cerdas Cergas Berbahasa Dan Bersastra Indonesia Kelas X. *Morfologi*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i2.394>
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority of the State in Land Tenure: Redistribution of Land to the People). *Negara Hukum Membangun Hukum*

- Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Dur, F., Yiğitcanlar, T., & Bunker, J. M. (2014). A Spatial-Indexing Model for Measuring Neighbourhood-Level Land-Use and Transport Integration. *Environment and Planning B Planning and Design*, 41(5), 792–812. <https://doi.org/10.1068/b39028>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Elwyn, G., Dehlendorf, C., Epstein, R. M., Marrin, K., White, J., & Frosch, D. L. (2014). Shared Decision Making and Motivational Interviewing: Achieving Patient-Centered Care Across the Spectrum of Health Care Problems. *The Annals of Family Medicine*, 12(3), 270–275. <https://doi.org/10.1370/afm.1615>
- Faiz, A., Hambali, D. S., Mulyadi, M., & Kurniawaty, I. (2022). Tinjauan Studi Pustaka Tahapan Domain Afektif Untuk Mengukur Karakter Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5508–5515. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3092>
- Fathiya, K. N., Widodo, P., Widana, I. D. K. K., & Saragih, H. R. J. (2023). Implementation of Spatial and Regional Plan Policies and Disaster Resilient Villages in West Nusa Tenggara. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (Ijhess)*, 3(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.541>
- Fauzan, F., Setiawan, A., Musaffak, & Rosita, F. Y. (2022). Pola Penelitian Membaca Cepat Dan Implikasinya Terhadap Keterampilan Membaca Cepat Bagi Calon Guru Bahasa Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 436–457. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.22719>
- Fetters, M. D., Curry, L., & Creswell, J. W. (2013). Achieving Integration in Mixed Methods Designs—Principles and Practices. *Health Services Research*, 48(6pt2), 2134–2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Gatto, M., Wollni, M., & Qaim, M. (2015). Oil Palm Boom and Land-Use Dynamics in Indonesia: The Role of Policies and Socioeconomic Factors. *Land Use Policy*, 46, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.03.001>
- Gunawan, A. (2025). Politik Hukum Berdasarkan Ketetapan MPR Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 5(02), 130. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5721>
- Hadi, A., Herawan, S., & Ma'akir, H. (2020). The Management Policy of State Lands as Aformer Ofright to Cultivatein Rejang Lebong Regency. *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 196–219. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9981

- Halcomb, E., & Hickman, L. (2015). Mixed Methods Research. *Nursing Standard*, 29(32), 41–47. <https://doi.org/10.7748/ns.29.32.41.e8858>
- Hamdhani, A. F., & Hadiyantina, S. (2025). Tanah Untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum Dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 8(1), 76–91. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.405>
- Hayat, H., Rudianto, R., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2023). The Implementation of the Regional Development Plan Policy Focuses on Developing the Potential of Empowered Villages in Batu City. *Aristo*, 12(1), 204–231. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.7628>
- Helitzer, E., Moss, H., & O’Donoghue, J. (2022). Lifting Spirits and Building Community: The Social, Emotional and Practical Benefits of All-Female Group Singing. *Health Promotion International*, 37(6). <https://doi.org/10.1093/heapro/daac112>
- Hidayat, M. F., Luthfi, A., & Salim, M. N. (2020). Desain Reforma Agraria Inklusif Untuk Program Keluarga Harapan Dan Kaum Difabel Di Kabupaten Kediri. *Tunas Agraria*, 3(1), 1–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.65>
- Indrawan, M., Caldecott, J., & Ermayanti, E. (2016). Mitigating Tensions Over Land Conversion in Papua, Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(1), 147–157. <https://doi.org/10.1002/app5.157>
- Indriani, N. T., Tangkudung, J., & Humaid, H. (2019). Evaluasi Manajemen Wellness Center Pegawai PT. Pertamina Gas Jakarta. *Tarbawi Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(2), 171–191. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i02.369>
- Indriyani, A., & Agustina, I. S. (2022). Strengthening of Agrarian Reform Implementation. *Jurnal Pertanahan*, 12(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v12i1.173>
- Issahaku, G., & Abdulai, A. (2019). Sustainable Land Management Practices and Technical and Environmental Efficiency Among Smallholder Farmers in Ghana. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 52(1), 96–116. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.34>
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. *Educational Researcher*, 33(7), 14–26. <https://doi.org/10.3102/0013189x033007014>
- Jumali, J. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4780–4797. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1273>
- Kalsum, E., & Caesariadi, T. W. (2016). Konsep Permukiman Kota Terpadu Mandiri. *Langkau Betang Jurnal Arsitektur*, 3(2), 12–24. <https://doi.org/10.26418/lantang.v3i2.18322>

- Karima, M., Istiqomah, I., & Wibowo, A. A. (2022). Determinants of Transmigrant Households' Income in Settlement Unit 3 Pagar Banyu, Ulu Talo District, Seluma Regency. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 423–438. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.423-438>
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>
- Kusuma, A. C., & Fath, A. (2025). Implementasi Reforma Agraria Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Batavia*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i1.149>
- Kuswahyono, I. (2024). *Telaah Kritis Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023: Konsistensi Praktik Kebijakan Reforma Agraria*. 2, 1–23.
- Kvale, S. (2006). Dominance Through Interviews and Dialogues. *Qualitative Inquiry*, 12(3), 480–500. <https://doi.org/10.1177/1077800406286235>
- Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). A Typology of Mixed Methods Research Designs. *Quality & Quantity*, 43(2), 265–275. <https://doi.org/10.1007/s11135-007-9105-3>
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono, H. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4820>
- Liu, Y., & Yamauchi, F. (2014). *Population Pressures, Migration, and the Returns to Human Capital and Land: Insights From Indonesia*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6790>
- Mahendra, D., Candra, A. I., Aisyah, F. W. M., Heru, R., & Rivianto, A. (2022). Stabilitas Tanah Lempung Berpasir Melalui Uji Kuat Geser Langsung Dengan Menggunakan Mesin Direct Shear Test. *Journal of Sustainable Civil Engineering (Josce)*, 4(02). <https://doi.org/10.47080/josce.v4i02.2042>
- Maknun, D., Gloria, R. Y., & Muzakki, J. A. (2020). Keterampilan Meneliti Yang Dimiliki Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Se-Wilayah III Cirebon. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ipa*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/jipi.v6i1.28251>
- Malta, M. (2021). Description of Ease of Market Access, Access to Information, and Availability of Transmigrant Transportation in Doing Business in Banyuasin and Ogan Ilir Regencies, South Sumatra Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 3(4), 257–265. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v3i4.678>
- Mardhiah, N., Marcela, A. D. R., Saputra, J., Muhammad, Z., & Bon, A. T. (2023). Identifying the Impact of Transmigration Policy on Local Community: A Case Study of Sigulai Village, Simeulue Regency, Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(2), 49–60.

<https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i2.203>

- Mardias, D., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 288–299. <https://doi.org/10.31933/mgavrn34>
- Masjoudi, M., Aslani, A., Khazaeian, S., & Fathnezhad-Kazemi, A. (2020). Explaining the Experience of Prenatal Care and Investigating the Association Between Psychological Factors With Self-Care in Pregnant Women During COVID-19 Pandemic: A Mixed Method Study Protocol. *Reproductive Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-020-00949-0>
- Maulana, A., Rafiq, F. M., & Septiani, D. (2024). Makna Leksikal Dan Makna Kultural Dalam Mitos Dan Pantangan Masyarakat Betawi. *Jurnal Sasindo Unpam*, 12(1), 39–48. <https://doi.org/10.32493/sasindo.v12i1.39-48>
- Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2022). Zona Interaksi Politik Dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria Di Nanggung, Kabupaten Bogor. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 75–100. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.75-100>
- Maulana, S., & Hidayatno, A. (n.d.). *Evaluating the Gaps to Achieve Sustainable Development at the Village Level in Indonesia Using a Systemic Framework*. <https://doi.org/10.46254/na07.20220231>
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21–32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862>
- Nasution, M. A., & Achmad, N. (2023). The Measurement of Public Policy Assessment of North Sumatra Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(3), 927–933. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180328>
- Ningrum, S., & Ginanjar, A. (2020). Interaksi Sosial Masyarakat Jawa Di Daerah Transmigrasi (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Lampung Timur). *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.15294/sosiolium.v2i1.33883>
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1927>
- Nurhamani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Nurjihadi, M. (2019). Review Terhadap Gagasan Reforma Agraria Indonesia: Antara Wacana, Kepentingan Dan Konflik Idiologi Ekonomi. *Nusantara Journal of Economics*, 1(02), 1–12. <https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.458>

- Nurrochmat, D. R. (2020). Menakar Efektivitas Program Tanah Objek Reforma Agraria. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 2(1), 49–56. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0201.49-56>
- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset Dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236–251. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.421>
- O'Connor, C. (2004). Effects of Central Decisions on Local Livelihoods in Indonesia: Potential Synergies Between the Programs of Transmigration and Industrial Forest Conversion. *Population and Environment*, 25(4), 319–333. <https://doi.org/10.1023/b:poen.0000036483.48822.2f>
- Olson, A. W., Isetts, B. J., Stratton, T. P., Vaidyanathan, R., Hillman, L., & Schommer, J. C. (2022). An Exploratory <sc>QUALquan</Sc> Comparison of P<sc>atient-centeredness</Sc> Priorities in Outpatient Care for Patients and Pharmacists. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 5(6), 579–589. <https://doi.org/10.1002/jac5.1618>
- Pacheco, P. (2009). Agrarian Reform in the Brazilian Amazon: Its Implications for Land Distribution and Deforestation. *World Development*, 37(8), 1337–1347. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.019>
- Pardela, P. A., & Octaviani, V. (2023). *Komunikasi Antar Msyrakt Pribumi Dgn Trnsmigrasi*. 10(2), 803–818.
- Prasada, I. Y., & Nugroho, A. D. (2022). *Determinant Factors of the Agricultural Land Sustainability in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/absr.k.220305.043>
- Prasetyoadi, D., & Fatima, H. H. P. (2024). Percepatan Tindak Lanjut TORA yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Potensi Asset dan Access Reform di Provinsi Kepulauan Riau. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4), 94–109. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.861>
- Prianggoro, A. A., & Pramono, R. W. D. (2023). Dilemma Pembentukan Institusi Bank Tanah: Pemerataan Sosial Atau Pertumbuhan Ekonomi? *Jurnal Planoeearth*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.31764/jpe.v8i2.13174>
- Purba, Y. Z. W., & Saleh, W. (2023). Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian. *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, 1(1), 71–92. <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132>
- Purnawan, H. (2021). Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia. *Jpsi (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p1-9>
- Purwaningsih, P., Ayuwat, D., & Cadchumsang, J. (2019). Transmigration Policy in the Context of Autonomy Era in East Kalimantan. *Iapa Proceedings Conference*, 650. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.257>

- Purwanto, R. (2021). Home Visit Method Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 8(1), 51–64. <https://doi.org/10.24042/terampil.v8i1.8639>
- Puspita Sari A.P, A. O. V., & Suhadi, S. (2024). Reformasi Regulasi Indonesia terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 49–74. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48691>
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. (2021). Peran GTRA Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Putri, F. I., Astalini, A., & Darmaji, D. (2025). Analisis Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Pengembangan E-Modul Fisika Matematika Pada Materi Persamaan Diferensial Biasa. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 146. <https://doi.org/10.30998/fjik.v11i2.16022>
- Rachman, C., & Noviarini, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penduduk Transmigran. *PARAMETER*, 3(1). <https://doi.org/10.37751/parameter.v3i1.55>
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset Dalam Reforma Agraria Di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Ramdani, M. F. (2020). Implementasi Kebijakan Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU Di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kalandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 4(6), 731–766. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.728>
- Rara, B., Sizi, C., & Munir, U. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2), 2020. <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v6i2.57>:<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index>
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>
- Rineksi, T. W. (2022). Strengthening GTRA Institutions in Responding to the Challenges of Agrarian Reform in Rejang Lebong Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 105–122. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i1.10>
- Riza, A. A., Anggoro, S., & Suryanti, S. (2020). POLA OSMOREGULASI, INDEKS PONDERAL, DAN KEMATANGAN GONAD KEPITING BAKAU (*Scylla Serrata*) DI TAMBAK DESA PESANTREN, KECAMATAN ULUJAMI, PEMALANG. *Saintek Perikanan Indonesian Journal of Fisheries*

- Science and Technology*, 16(1), 31–38. <https://doi.org/10.14710/ijfst.16.1.31-38>
- Rizqila, R. A. S., & Taupiqqurahman, T. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 84–99. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7904>
- Rojikhah, A., Leksono, A. S., & Rachmansyah, A. (2023). Evaluation of Environmental Carrying Capacity Based on Land Capability for Agriculture Development in the Melolo Transmigration Area, East Sumba. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1239(1), 12036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1239/1/012036>
- Rosmini, R., Nurliawati, N., & Gedeona, H. T. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1374–1388. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3500>
- Rustiadi, E., & Junaidi. (2014). Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. *Jurnal Bumi Lestari*, 14(2).
- Sagala, C., Wandini, R. R., & Sianipar, D. R. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Di SMP IT Mutiara Sei Mencirim Sunggal. *Innovative Journal of Social Science Research*, 3(6), 7733–7740. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7365>
- Sakaran, S. S., & Noor, H. M. (2020). Konsep Kemudahan Dalam Perkhidmatan Pengangkutan Awam. *Jurnal Kinabalu*, 127. <https://doi.org/10.51200/ejk.vi.2495>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria Di Kawasan Hutan. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Santoso, U. (2023). Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Perspektif*, 28(3), 154–164. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.886>
- Selfiyanti, B., Setiawan, F., & Mirnawati, L. B. (2022). Peningkatan Literasi Berbicara Menggunakan Media Gambar Berseri Pada Siswa Kelas II SD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 59–68. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2822>
- Setiawan, A. T., Kistiyah, S., & Laksamana, R. (2021). Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi. *Tunas Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>
- Seto, K. C., Fragkias, M., Güneralp, B., & Reilly, M. (2011). A Meta-Analysis of Global Urban Land Expansion. *Plos One*, 6(8), e23777.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023777>

- Shorten, A., & Smith, J. (2017). Mixed Methods Research: Expanding the Evidence Base. *Evidence-Based Nursing*, 20(3), 74–75. <https://doi.org/10.1136/eb-2017-102699>
- Sienkiewicz, S. (2022). The Tradition of Indigenous People and the Status of Internal Migrants – The Story of Exclusion in West Seram (Maluku, Indonesia). *The Australian Journal of Anthropology*, 33(2), 263–278. <https://doi.org/10.1111/taja.12445>
- Sihotang, A. M., Nasrizal, N., & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Rakit Kulim Dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya). *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 691–703. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4348>
- Simatupang, R. L., Sutaryono, S., & Luthfi, A. (2021). Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan. *Tunas Agraria*, 4(1), 113–135. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.138>
- Sinaga, J. (2014). Analisis Potensi Erosi Pada Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai Sedau Di Kecamatan Singkawang Selatan. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/jtllb.v2i1.7306>
- Soewandita, H. (2018). Analisis Potensi dan Karakteristik lahan di Pulau Kecil untuk Menunjang Pengembangan Kawasan Transmigrasi. *Seminar Nasional Geomatika*, 2. <https://doi.org/10.24895/sng.2017.2-0.458>
- Song, X., Chang, K., Yang, L. E., & Scheffran, J. (2016). Change in Environmental Benefits of Urban Land Use and Its Drivers in Chinese Cities, 2000–2010. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(6), 535. <https://doi.org/10.3390/ijerph13060535>
- Souza, D. M. d., Teixeira, R. F. M., & Ostermann, O. (2014). Assessing Biodiversity Loss Due to Land Use With Life Cycle Assessment: Are We There Yet? *Global Change Biology*, 21(1), 32–47. <https://doi.org/10.1111/gcb.12709>
- Stafford-Smith, M., Griggs, D., Gaffney, O., Ullah, F., Reyers, B., Kanie, N., Stigson, B., Shrivastava, P., Leach, M., & O’Connell, D. (2016). Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 12(6), 911–919. <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>
- Suhudi, S., & Rahma, P. D. (2022). Perencanaan Dinding Penahan Tanah Tipe Gravitasi Di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. *Jurnal Teknik Sipil Itp*, 9(2), 2. <https://doi.org/10.21063/jts.2022.v902.02>
- Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). Transpolitik: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8157>

- SUKEMI, S. (2022). Model Pembelajaran Discovery Secara Blended Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Asam Dan Basa. *Science Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan Ipa*, 2(1), 86–97. <https://doi.org/10.51878/science.v2i1.1034>
- Sukmaniar, S., & Saputra, W. (2020). Transmigrasi Wilayah Perbatasan di Indonesia. *UNM Geographic Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.26858/ugj.v3i1.14599>
- Sulistiyono, K., Nasri, M., Ramadhan, M. R., & Saripudin, A. (2024). Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 229–234. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2244>
- Sutadi, R. D., Luthfi, A., & Mujiburrohan, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Sutisna, S. H., Rozak, A., & Saputra, W. R. (2023). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6895–6902. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2718>
- Syah, I., Muhammad, B., Masduki, E., & Asropi, A. (2023). Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 18(1), 101. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i1.12093>
- Syahyuti, nFN. (2016). Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah Dan Struktur Pedesaan Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 19(1), 21. <https://doi.org/10.21082/fae.v19n1.2001.21-32>
- Syawal, A. (2023). Network Governance in the Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy in Makassar City. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14099>
- Tigno, J. V. (2015). Tirtosudarmo R, <i>From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia</i>. *Asian and Pacific Migration Journal*, 24(2), 265–269. <https://doi.org/10.1177/0117196815579958>
- Tridakusumah, A. C., Supyandi, D., & Sukayat, Y. (2016). *Social Identity, Ethnicity and Internal Mobility in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.54>
- Udessa, F., Adugna, D., & Workalemahu, L. (2023). Challenges to the Practice of Good Governance in Urban Land Use Planning: The Case of Two Selected Ethiopian Towns. *Sustainability*, 15(9), 7248. <https://doi.org/10.3390/su15097248>
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*,

6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.79>

- Wahyuni, W., Rineksi, T. W., Sunandar, M. A., & Sirajuddin, M. M. (2025). Strategi Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Untuk Pecepatan Reforma Agraria Di Kabupaten Banyuwangi. *Tunas Agraria*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.366>
- Whitten, A. J. (1987). Indonesia's Transmigration Program and Its Role in the Loss of Tropical Rain Forests*. *Conservation Biology*, 1(3), 239–246. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.1987.tb00038.x>
- Wibowo, F. S., Wibowo, G. D. H., & Putro, W. D. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2027. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p06>
- Widati, A. W. (2020). Indeks Coping Strategy Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Keerom (Farmers' Household Food Coping Strategy Index in Keerom Regency). *Sap*, 9(1), 38–46. <https://doi.org/10.30862/sap.v9i1.78>
- Widyatmoko, B., & Dewi, R. (2019). Dynamics of Transmigration Policy as Supporting Policy of Palm Oil Plantation Development in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9(1), 35–55. <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i1.139>
- Wijaya, C., & Sari, V. D. P. (2020). Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 225. <https://doi.org/10.26858/jiap.v9i2.11763>
- Wijst, T. V. D. (1985). Transmigration in Indonesia: An Evaluation of a Population Redistribution Policy. *Population Research and Policy Review*, 4(1), 1–30. <https://doi.org/10.1007/bf00125539>
- Wiradi, G. (2005). *Reforma Agraria untuk Pemula* (E. Aritonang (ed.); 2005th ed.). Sekretariat Bina Desa. <https://www.slideshare.net/slideshow/reforma-agraria-untuk-pemula/239988205#2>
- Yasir, M. (2023). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Dan Masyarakat Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Yulmardi, Y., Amir, A., Erfit, E., & Junaidi, J. (2018). Where Is the Second Generation Nowadays? Evidence From Former Transmigration Villages in Jambi Province, Indonesia. *Open Journal of Social Sciences*, 06(04), 282–293. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.64024>
- Yulmardi, Y., Junaidi, J., & Putra, D. N. (2023). Is the Second Generation of Transmigrants More Prosperous? A Study of Intergenerational Welfare in Ex-Transmigration Settlements. *Agricultural and Resource Economics*

International Scientific E-Journal, 9(1).
<https://doi.org/10.51599/are.2023.09.01.08>

Yuniza, M. E., & Inggarwati, M. P. (2021). The Urgency of Transpolitan Transmigration's Regulation as an Effort to Accelerate National Development. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(2), 81–96.
<https://doi.org/10.25041/aclr.v2i2.2326>